

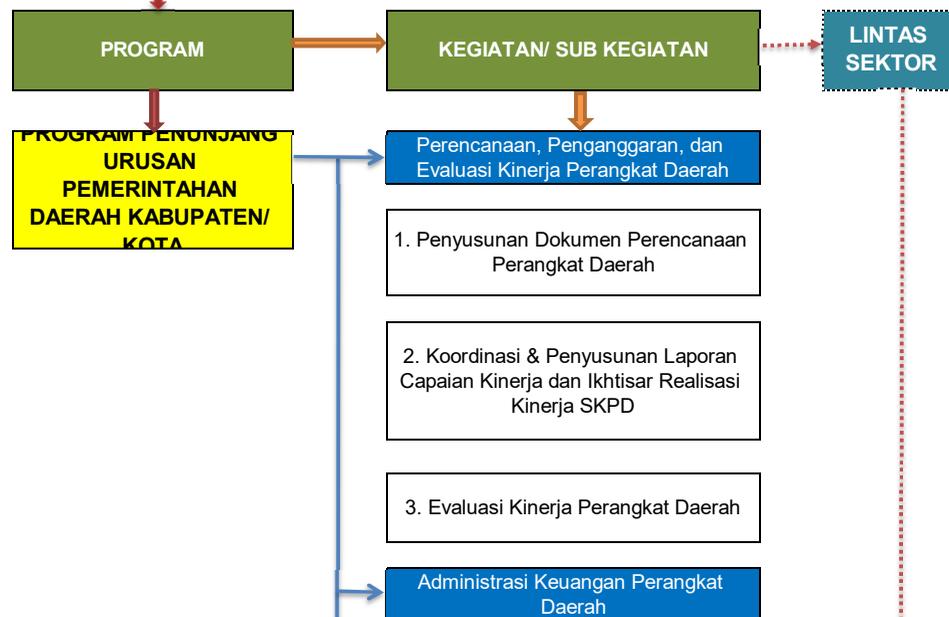


# CROSS CUTTING DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONE 2021



**SASARAN**  
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN URUSAN KETENAGAKERJAAN

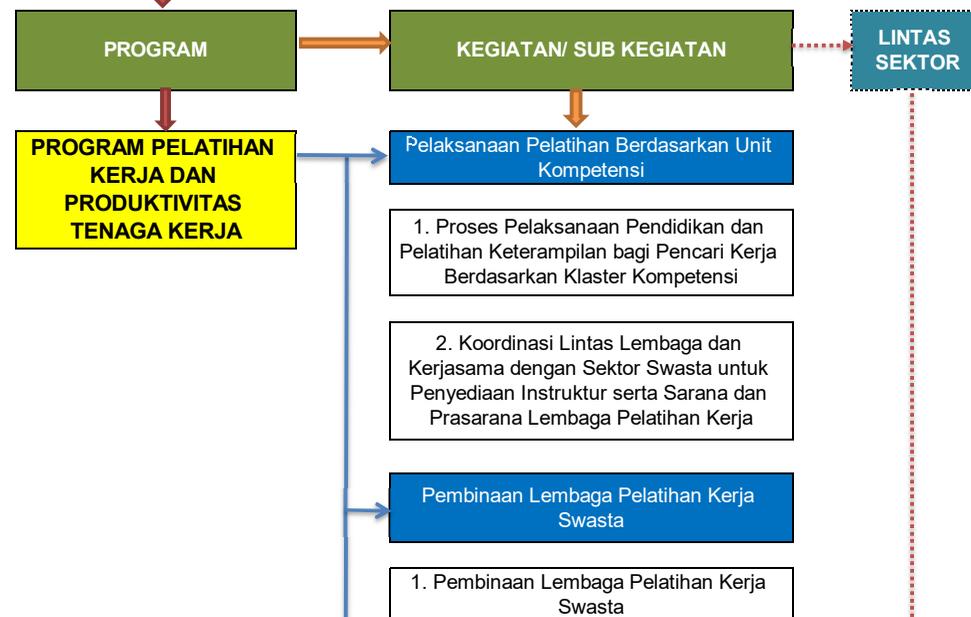
**INDIKATOR**  
NILAI SAKIP OLEH APIP



**SASARAN**  
1. MENINGKATNYA DAYA SAING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA BERKOMPETEN  
2. MENINGKATNYA JAMINAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

**INDIKATOR**

1. PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA TERLATIH
2. PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN/ INDUSTRI
3. JUMLAH WIRUSAHA (UKM/ UMKM) BARU
4. JUMLAH TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN PADA PERUSAHAAN
5. JUMLAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
6. PERSENTASE JUMLAH PESERTA JAMSOSTEK
7. BESARAN KASUS YANG DITANGANI DENGAN PERJANJIAN BERSAMA



1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

**PROGRAM  
PENEMPATAN TENAGA  
KERJA**

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perluasan Kesempatan Kerja

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia)

Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

**PROGRAM HUBUNGAN  
INDUSTRIAL**

LINTAS SEKTOR

LINTAS SEKTOR

